

Pilihan Rasional di Balik Pembebasan Corby

G.P.B. Suka Arjawa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ABSTRAK

Pembebasan tahanan narkoba yang merupakan warga negara Australia, Schapelle Leigh Corby menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak pihak yang menentang pembebasan tersebut. Pertentangan tersebut terjadi karena adanya indikasi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Australia mengenai ekstradisi tahanan korupsi. Meski demikian dalam konteks pilihan rasional, keputusan tersebut diambil oleh pemerintah Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Apabila diamati, pembebasan tersebut memiliki keuntungan bagi masyarakat dan negara Indonesia. Bagi negara dan pemerintah pembebasan tersebut dapat meningkatkan hubungan persahabatan bagi kedua negara, sekaligus upaya untuk menghadapi perkembangan politik kawasan Pasifik Selatan di masa mendatang.

Kata-Kata Kunci: *pilihan rasional, keuntungan maksimal.*

An exemption of a narcotic prisoner, an Australian citizen, Schepelle Leigh Corby, cause a dissent among the people in Indonesia. Many of the people oppose those exemption. That opposition happens cause of an indication that there is an agreement between Indonesia and Australia government on the extradition of corruption prisoner. Though, in the context of rational choice that decision was taken by the Indonesia government with some considerations to gain a maximum benefit. If we observe it, those exemption has some benefits for the people and Indonesia government. For the state and Indonesia government those exemption could improve a relationship between the states, as well as means to facing the political developments of South Pasific regions in the future.

Keywords: *rational choice, a maximum benefit.*

Schappelle Corby telah dibebaskan dari penjara di Kerobokan Bali. Tahanan narkoba ini bebas pada tanggal 10 Februari 2014 dan mendapat perhatian besar dari media massa, baik domestik maupun internasional. Pembebasan orang yang sering disebut ratu mariyuana tersebut dipandang kontroversial oleh masyarakat Indonesia. Corby tertangkap tangan membawa 4,2 kg ganja kering di Bandara Ngurah Rai tanggal 8 Oktober 2004. Pengadilan memvonis warga Australia ini 20 tahun penjara pada bulan Mei 2005. Pengadilan Tinggi Denpasar kemudian mengurangi hukuman tersebut menjadi 15 tahun penjara pada bulan Oktober 2005. Tetapi Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa dan mengembalikan hukuman itu menjadi 20 tahun. Tanggal 10 Februari 2014, melalui beberapa remisi dan grasi presiden, Corby bebas bersyarat dari penjara Kerobokan Denpasar. Pembebasan inilah yang mendapatkan pandangan kontroversial dari masyarakat. Secara total Corby mendapatkan pengurangan hukuman sebanyak 40 bulan 30 hari (*Tempo* 23 Februari 2014, hal. 91).

Secara sosiologis, pembebasan tersebut berdampak negatif bagi masyarakat karena dipandang dapat memberikan inspirasi pada masyarakat untuk meniru perbuatan tersebut. Artinya, meski telah mendapat hukuman seumur hidup, atau 20 tahun, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan, hukuman tersebut dapat dikurangi. Pendekatan inilah yang diindikasikan oleh masyarakat mengandung unsur politik. Secara politis, pembebasan tersebut dipandang dapat merugikan citra pemerintah Indonesia. Pemerintah dipandang tidak konsisten karena membuat keputusan yang bertentangan dengan apa yang dikonsepsikan sebelumnya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, disebutkan adanya pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi tahanan narkoba, korupsi dan terorisme. Hal ini menyebabkan kekecewaan masyarakat di Indonesia. Bagi masyarakat Australia, pembebasan itu mempunyai makna lain karena Corby dipandang hanya menjadi korban dari jaringan narkoba yang menjadi sindikat internasional. Permintaan untuk memeriksa sidik jari yang ada di dalam tas Corby, tidak pernah dilakukan (*Suara Merdeka* 10 Februari 2014).

Dalam konteks hubungan antar negara, terutama antara Indonesia dengan Australia, pembebasan Corby ini memiliki makna lain yang dapat meningkatkan hubungan politik (diplomasi), sosial, serta budaya antara kedua negara. Pada Januari 2012, Pemerintah Australia mengusulkan pertukaran narapidana. Pihak Australia menghendaki pembebasan Corby yang ditukar dengan narapidana kasus korupsi Indonesia yang ada di Australia (*Tempo* 23 Februari 2014, hal. 91). Hal ini dipandang menjadi faktor pendorong bagi Pemerintah Indonesia untuk membebaskan narapidana tersebut. Pertukaran tersebut dipandang dapat membentuk kondisi positif bagi kedua negara secara

diplomatik. Tidak hanya itu, pembebasan Corby juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk menghadapi dan mengimbangi perkembangan politik di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik saat ini.

Berdasarkan teori pilihan rasional, Pemerintah Indonesia dipandang mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan hal tersebut. Meskipun alasan pasti dari pembebasan tersebut tidak pernah diutarakan secara jelas oleh pemerintah. Namun dalam hal ini keputusan tersebut diambil guna mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Teori Pilihan Rasional

Dalam proses pembuatan keputusan, baik pada level mikro maupun makro, setiap aktor memiliki pertimbangan-pertimbangan rasional guna mencapai keuntungan maksimal. Pertimbangan tersebut didasarkan pada berbagai pengetahuan, informasi, serta data yang memberikan sumbangan kognitif kepada aktor. Dalam hal ini, aktor merupakan aparatur atau tokoh yang berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan, baik atas nama pribadi maupun perwakilan organisasi.

Pada level mikro, pembuatan keputusan terfokus pada masyarakat seperti misalnya keluarga. Sedangkan pada tingkat makro, pembuatan keputusan ini diterapkan pada tingkat global yang menyangkut hubungan antar negara. Teori Pilihan Rasional merupakan salah satu perangkat akademis yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu keputusan dibuat, untuk mencapai tujuan yang dipandang maksimal. Dalam hal negara, keputusan itu dibuat demi mencapai tujuan atau kepentingan dari negara, baik yang bersifat politis maupun bukan.

Teori Pilihan Rasional berasal dari ilmu sosiologi. Akan tetapi, karena dalam pembuatan keputusan pada level antar negara juga dilakukan oleh individu atau kelompok, korporasi dan aktor lainnya, yang juga menjadi salah satu kajian dari teori pilihan rasional, maka teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat global. Pada hakekatnya globalisasi atau hubungan antar negara merupakan gambaran makro dari apa yang terjadi secara sosiologis. Pembuatan keputusan untuk memperbaiki hubungan antar negara, dibuat oleh pihak eksekutif dan legislatif, melalui kolaborasi dan hubungan intensif, serta pertimbangan-pertimbangan yang merupakan wujud dari berbagai kontak sosial, baik antar lembaga maupun individu, yang dilakukan sebelum keputusan politik dibuat. Hal ini lah yang

menjadi kajian teori pilihan rasional dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan.

Berdasarkan penjelasan James S. Coleman, salah satu sumber yang berperan dalam proses pembuatan kebijakan pada teori pilihan rasional adalah aktor dan sumber daya. Dalam hal ini, aktor berperan dalam menjalankan dan mengendalikan sumber daya terhadap mereka yang mencari sumber daya (Ritzer 2007, 399). Dari pandangan ini dapat dikatakan bahwa kontrol atas sumber daya sangat bergantung pada kemampuan dari aktor yang bersangkutan, berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang paling menguntungkan baginya. Aktor dalam hal ini dapat berbentuk korporat (kelompok) atau individu. Dari pandangan inilah kemudian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan aktor yang membuat keputusan demi tujuan dari negara. Seperti yang dikatakan oleh Brian Fay, bahwa salah satu tugas utama dari ilmu sosial interpretif adalah menemukan niat atau latar belakang aktor dalam melakukan suatu tindakan (Gibbons 2002, 91). Inilah yang secara historis disebut dengan *verstehen*. Maka, untuk dapat menemukan rasionalitas dari suatu tindakan yang dilakukan negara, dilakukan penafsiran terhadap keputusan tersebut, berdasarkan pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan.

Coleman juga menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu tindakan, individu melakukan hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan informasi yang didapat. Berkaitan dengan hal ini dijelaskan bahwa pertimbangan tersebut dilakukan demi mendapatkan keputusan yang terbaik. Dengan demikian, teori pilihan rasional dapat diterapkan di level masyarakat, baik pada sektor budaya maupun politik. Selanjutnya, pendapat yang menekankan pada komponen kognitif dalam melakukan pertimbangan demi membuat keputusan juga didukung oleh pendapat Philip Mellor (1999) yang menyatakan bahwa proses belajar (kognitif) itu tidak hanya didapatkan dari akumulasi mengumpulkan informasi semata tetapi juga sebuah fenomena yang dipengaruhi oleh hubungan dengan teman, keluarga, komunitas serta kekuatan-kekuatan lainnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam teori pilihan rasional digunakan pertimbangan-pertimbangan kognitif yang mengedepankan keuntungan paling maksimal bagi pihak-pihak yang menerapkannya. Apabila individu dan kelompok dapat menerapkan teori ini untuk mencapai kepentingannya maka hal ini juga berlaku bagi negara. Negara yang dijalankan oleh pemerintah, pada hekekatnya digerakkan oleh individu dan kelompok. Mereka inilah yang membuat keputusan-keputusan dalam pemerintahan.

Apabila dikaitkan dengan politik luar negeri dan domestik dari suatu negara, teori pilihan rasional ini bermanfaat untuk menerangkan atau mengetahui alasan negara dalam membuat kebijakan-kebijakan politik tertentu. Politik luar negeri suatu negara merupakan kepanjangan dari politik dalam negerinya (Holsti 1987, 175). Sedangkan politik dalam negeri merupakan cerminan kebutuhan politik, sosial dan ekonomi, yang juga dikaitkan dengan kondisi sosiologis suatu negara.

Di sisi lain, Marsh dan Stoker menyebutkan bahwa teori pilihan rasional menitikberatkan pada keputusan individu. Mereka menyebutkan bahwa teori ini menjelaskan tindakan individu dan hasil yang ditetapkan (Marsh dan Stoker 2010, 81). Berdasarkan penjelasan selanjutnya dikatakan bahwa dalam membuat keputusan atau kebijakan, aktor tetap mempertimbangkan pandangan atau pendapat orang lain sebelum menetapkan keputusannya. Marsh dan Stoker menjelaskan bahwa pertimbangan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhitungan logika dan matematika, sehingga dapat diperkirakan hasil yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi aktor.

Tidak hanya berfokus pada peran individu dalam proses pembuatan keputusan, teori pilihan rasional juga dapat digunakan dalam level kelompok atau korporat. Pemikiran Coleman menyebutkan bahwa konteks mikro dalam teori pilihan rasional ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku kolektif, karena ada pemindahan pengendalian seseorang menuju pihak lain yang lebih banyak (Ritzer 1997, 396). Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus perintah seseorang kepada beberapa orang yang mau menjalankan perintahnya. Sehingga pada akhirnya Coleman menyebutkan bahwa teori pilihan rasional juga dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku korporat, dengan catatan bahwa tindakan tersebut merupakan sikap dari korporat (Ritzer 1997, 398). Pernyataan tersebut juga didukung oleh John Scott yang menyatakan bahwa individu memegang peranan penting dalam teori pilihan rasional. Tetapi ia juga memperhatikan peran aktor lain, yakni kelompok. Dalam pandangannya, kelompok tersebut tetap digerakkan oleh individu yang memiliki pengaruh dominan dalam aparatur.

Dengan demikian, pemikiran Coleman dan Scoot memiliki kesamaan mengenai peran serta tindakan aktor korporat dan kelompok berdasarkan teori pilihan rasional. Terdapat dua kondisi yang dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara individu dan kelompok berdasarkan teori pilihan rasional, 1) ketika pemikiran individu digunakan sebagai pandangan bersama oleh kelompok, 2) ketika tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau korporat tersebut ditujukan untuk mencapai keuntungan bersama dan paling maksimal.

Posisi Negara dalam Teori Pilihan Rasional

Pada konteks hubungan internasional, negara merupakan aktor utama (Muchtar 2013, 39). Negara pada hakekatnya merupakan sebuah kesatuan kelompok yang terdiri dari berbagai organisasi, baik yang bersifat budaya, ekonomi, politik, maupun organisasi lainnya. Di sisi lain, merujuk pada Robert M. MacIver negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam masyarakat melalui hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat memaksa (Budiardjo 1985, 41). Maka, pejabat-pejabat politik yang melakukan tindakan atas negara atau pemerintahan dapat dikatakan melaksanakan keputusan atas nama kelompok, yang kemudian menjadi keputusan atau kebijakan negara. Mereka adalah aktor yang disebut sebagai aparatur negara dan segala keputusan yang dilakukannya merupakan atas nama negara. Dari sisi pandangan Coleman, hal ini disebut sebagai faktor makro dalam hal pelaksanaan teori pilihan rasional. Dengan demikian, presiden, menteri dan pejabat-pejabat lainnya melaksanakan keputusan tersebut atas nama negara. Negara dalam konteks demikian dipandang mempunyai sikap tersendiri dalam membuat keputusan-keputusan politiknya. Posisi atau keputusan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lain mencerminkan bagaimana sikap negara tersebut.

Faktor yang Berpengaruh dalam Pembuatan Keputusan

Dalam konteks teori pilihan rasional, pejabat-pejabat pemerintah atau aparatur negara merupakan aktor yang paling berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan. Dalam kasus ini, aktor-aktor tersebut tidak ada yang mengungkapkan alasan pasti mengenai keputusan pembebasan bersyarat Corby dari penjara Kerobokan, Denpasar Bali. Menteri Hukum dan Hak Asia Manusia hanya menyatakan bahwa pembebasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Presiden Susilo Bambang Yudoyono, melalui juru bicaranya juga menyebutkan bahwa pembebasan itu sudah tepat dan tidak melanggar hukum (Rastika 2014). Merujuk pada teori pilihan rasional, dapat dilihat bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pada informasi-informasi atau pengetahuan yang ada. Untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai keputusan pembebasan Corby oleh pemerintah dapat dilihat dan ditafsirkan menggunakan *verstehen*, yang merupakan peristiwa mutakhir yang menyangkut hubungan Indonesia dengan negara lain.

Hubungan Indonesia dengan Australia, dapat dikatakan tidak terlalu baik. Sebagai negara yang memiliki kedekatan geografis, kedua negara berupaya saling memahami pola budaya masyarakat masing-masing. Dalam hal pendidikan misalnya, banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia dan sebaliknya mahasiswa Australia juga banyak

yang belajar kebudayaan Indonesia. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan, hubungan pasang surut antara Indonesia dan Australia terus terjadi. Misalnya ketika Presiden Soeharto masih berkuasa, media massa Australia pernah memuat berita tentang kekayaan anggota keluarga presiden. Ini yang membuat Presiden Soeharto marah yang kemudian membuat hubungan kedua negara menjadi tidak baik. Jauh sebelumnya, ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1963, Australia juga memihak pada Malaysia. Kemudian ketika rakyat Timor Timur melakukan jajak pendapat untuk menentukan nasib sendiri, Australia mengambil posisi mendukung kemenangan rakyat Timor Timur yang memilih menjadi negara merdeka. Kondisi-kondisi tersebut secara psikologis menyakitkan bagi Indonesia, yang berupaya untuk memelihara persahabatan dengan Australia.

Dengan melihat hubungan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam konteks hubungan antar negara, Australia berada dalam posisi yang lebih dominan dibanding dengan Indonesia. Australia terlihat mencari celah yang dapat menguntungkan negaranya. Sebagai negara yang mempunyai keterikatan dengan budaya Barat (Eropa), Australia berusaha mengambil keuntungan dengan membuat keputusan sesuai dengan pendekatan budaya tersebut. Dalam kasus pemberitaan kekayaan Presiden Soeharto oleh media di Australia, pemerintah Australia menganggap hal tersebut merupakan wujud pendekatan kultural yang dalam budaya demokrasi mereka (Australia dan Barat), keterbukaan merupakan hak dari warga. Pemerintah Australia tidak pernah mengambil sikap tegas terhadap koran dan wartawan yang membuat pemberitaan tersebut. Di sisi lain, dukungan Australia kepada Timor Timur untuk mencapai kemerdekaan, dipandang mempunyai dua tujuan, yakni 1) eksplorasi minyak bumi lepas pantai Timor Timur, 2) hubungannya dengan Portugal sebagai negara Eropa yang pernah menjajah Timor Timur. Hubungan kultural tersebut mendekatkan Australia dengan Timor Timur yang memilih lepas dari Indonesia melalui jajak pendapat tahun 1999. Sikap ini lebih menegaskan posisi Australia yang berada pada titik ordinat dibanding Indonesia dalam konteks hubungan kedua negara.

Di luar hubungan dengan Australia, posisi Indonesia dalam konteks hubungan internasional juga mengalami pasang surut dengan negara lain. Dengan Malaysia hubungan Indonesia juga tidak terlalu bagus. Secara historis hubungan Indonesia dengan Malaysia juga mengalami pasang surut cukup tajam. Awal dari persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia terjadi pada tahun 1963 ketika Indonesia memprotes upaya pembentukan federasi Malaysia yang menggabungkan Brunei, Serawak, dan Sabah. Konflik ini kemudian dapat diselesaikan pada masa Orde Baru, yang kemudian juga diikuti oleh pembentukan ASEAN, dengan Presiden Soeharto sebagai salah satu pemrakarsanya. ASEAN

merupakan organisasi regional yang menggabungkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi tersebut dibentuk dengan berbagai tujuan yang meliputi, 1) upaya politis untuk menggabungkan seluruh negara di Asia Tenggara dalam menghadapi pengaruh asing di kawasan, 2) dalam konteks politik, Indonesia di bawah kekuasaan Soeharto ingin memperbaiki citra politik luar negeri Indonesia dari sifat agresif yang melekat pada jaman Orde Lama, serta upaya untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga, 3) upaya penyelesaian konflik dengan pihak Malaysia.

Pada perkembangan selanjutnya, terutama berkaitan dengan jatuhnya rezim Orde Baru, hubungan yang terjadi sifatnya kontradiktif dan tidak kooperatif. Berawal dari perebutan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan, meskipun konflik tersebut sudah dimulai sejak tahun 1969 tetapi pada tahun 1997, kedua negara sepakat membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Lembaga internasional kemudian memutuskan Malaysia sebagai negara yang berhak memiliki kedua pulau tersebut. Meskipun telah terjadi kesepakatan tahun 1997 bahwa kedua negara sepakat untuk menerima keputusan Mahkamah Internasional, tetapi kemenangan Malaysia membuat perasaan Bangsa Indonesia tertekan.

Berbagai konflik yang terjadi selanjutnya adalah adanya klaim terhadap perairan Ambalat tahun 2005, serta klaim lagu Rasa Sayange pada tahun 2007. Berkaitan dengan klaim atas Ambalat telah diselesaikan secara damai karena memang Indonesia yang mempunyai wilayah tersebut. Sedangkan klaim atas lagu Rasa Sayange masih berlanjut karena Menteri Pariwisata Malaysia menyatakan bahwa lagu tersebut merupakan lagu Kepulauan Nusantara, yang mencakup Malaysia di dalamnya. Selain itu, pada tahun 2011, kurang lebih terjadi tiga masalah yang menyangkut Indonesia dan Malaysia, yaitu 1) kasus penangkapan nelayan Malaysia yang melanggar perbatasan, oleh aparat Indonesia, 2) didirikannya Musium Kerici di Malaysia serta adanya perubahan tapal batas di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang ditemukan oleh Komisi I DPR RI, 3) Persoalan tentang Tari Pendet yang digunakan untuk promosi pariwisata di Malaysia, serta masalah klaim atas kain batik oleh Malaysia.

Dalam konteks hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, meskipun Indonesia selalu bereaksi keras terhadap berbagai klaim yang dilakukan Malaysia, tetapi dalam pola hubungan konflik dapat dilihat bahwa pihak Malaysia berada dalam posisi yang lebih dominan dibanding Indonesia (lebih berani). Pemerintah Indonesia tidak pernah berupaya untuk mengklaim wilayah perbatasan maupun hal lain dari Malaysia. Munculnya berbagai klaim dari Malaysia seperti yang disebutkan diatas, memperlihatkan dominasi Malaysia terhadap pola-pola konflik tersebut. Dominasi ini dinilai ikut membebani Malaysia.

Meski demikian, Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam bersikap terhadap Australia. Beberapa pelarian koruptor Indonesia diindikasikan berada di wilayah Australia. Keberhasilan dalam menangkap koruptor-koruptor tersebut akan memberikan dampak positif bagi pemerintah Indonesia. Salah satu dari koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Australia adalah Adrian Kiki Ariawan. Adrian merupakan mantan Direktur Bank Surya yang ditetapkan mendapat hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2002. Adrian terbukti melakukan tindakan korupsi penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebanyak 1,5 triliun rupiah. Pengadilan Tinggi juga telah memutuskan agar Adrian Kiki diekstradisi ke Indonesia dan telah diserahterimakan di Bandara International Perth pada tanggal 22 Januari 2014 (Nugroho 2014). Hal itulah yang dipermasalahkan oleh masyarakat yang menentang pembebasan Corby, yang dianggap sebagai keputusan politis dengan adanya pertukaran tahanan antara Indonesia dengan Australia. Jarak waktu antara pembebasan Corby dengan diekstradisikannya Adrian Kiki ke Indonesia relatif dekat, kurang dari satu bulan. Ekstradisi tahanan koruptor tersebut memberikan nilai positif terhadap perkembangan politik Indonesia pada masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus mewaspadai kebijakan Australia yang setuju terhadap penempatan pasukan Amerika Serikat di wilayahnya. Pemerintah Australia telah sepakat dengan penempatan pasukan Amerika Serikat di Pulau Cocos. Sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat itu sudah tiba di Australia pada awal bulan April 2012. Rencananya pada tahun 2017, jumlah pasukan itu akan meningkat hingga mencapai 2.500 orang. Hal ini berpengaruh pada pola pemikiran para elit politik Indonesia (Tumanggor 2012). Berkaitan dengan persepsi ancaman, kedekatan jarak antara Pulau Cocos dengan Pulau Jawa yang dapat ditempuh hanya dalam waktu beberapa menit menimbulkan kekhawatiran dari para elit politik Indonesia. Dalam konteks hubungan internasional, penempatan pasukan militer tersebut membuat Indonesia berada pada posisi subordinatif dengan Australia. Dengan adanya berbagai persoalan eksternal yang dihadapi, misalnya protes Pemerintah Singapura atas penamaan kapal perang Indonesia Usman Harun, membuat upaya untuk menjaga hubungan baik dengan negara tetangga harus diutamakan, demi masa depan Indonesia.

Keutungan bagi Indonesia

Berkaitan dengan hal-hal yang terjadi diatas, faktor-faktor yang mengganggu pemerintah juga berpotensi dapat mengganggu proses pembangunan masyarakat Indonesia, terutama yang menyangkut pembangunan politik serta demokrasi. Pembangunan politik dan demokrasi dalam hal ini merupakan faktor terpenting karena dapat berpengaruh terhadap pembangunan di segala bidang seperti, ekonomi, sosial dan budaya.

Bagi pemerintah Indonesia, pembebasan Corby tidak memiliki keterkaitan dengan ekstradisi Adrian Kiki yang dilakukan oleh pengadilan Australia. Akan tetapi, pengekradisian koruptor BLBI tersebut mampu memberikan penilaian positif masyarakat kepada pemerintah, menyangkut pola kebijakan politik pemerintah Indonesia di era reformasi yang menekankan pada upaya pemberantasan korupsi. Banyak media memberitakan tentang dieskradisikannya buronan ini ke Indonesia. Apabila dilihat dari rentang waktu pengekradisian Adrian Kiki ke Indonesia dengan pembebasan Corby, memang terdapat kemungkinan bahwa kedua peristiwa tersebut memiliki keterkaitan. Jika memang benar kedua hal tersebut memiliki keterkaitan maka kebijakan pemerintah Indonesia dapat dianggap sebagai keputusan yang rasional. Pemerintah mendapatkan dua poin positif, 1) Pada tingkat masyarakat, pemerintah mendapatkan citra positif karena berhasil mengembalikan buronan korupsi, 2) Pada tingkat politik, keberhasilan tersebut berimplikasi terhadap dukungan yang lebih besar pada kebijakan pemerintah era reformasi mengenai pemberantasan korupsi.

Dikaitkan dengan beberapa pemikiran yang ada di Indonesia, ekstradisi Adrian Kiki ini memiliki nilai penting. Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz mengatakan bahwa tidak seluruhnya kroni-kroni Soeharto dapat diberantas dengan mudah karena memiliki banyak jaringan bahkan di luar negeri. Disebutkan pula bahwa demokrasi yang terjadi digerakkan oleh politik uang dan intimidasi politik (Marijan 2012, 10).

Secara sosial, budaya masyarakat Indonesia adalah hidup berdampingan secara damai. Seperti yang diungkapkan dalam pembukaan konstitusi, Indonesia turut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Secara implisit hal ini menyatakan bahwa Indonesia tidak menyukai konflik. Dalam upaya menyelesaikan persengketaan, Indonesia juga lebih menyukai cara-cara damai dibanding dengan cara kekerasan. Merujuk pada pandangan idealisme yang menyatakan bahwa perdamaian dapat terjadi pada suatu negara, ketika individu maupun negara mampu menikmati kesejahteraan, kebebasan dan tidak adanya ancaman dari pihak manapun (Richmond 2008, 9). Masyarakat Indonesia juga menjunjung tinggi ajaran atau nilai-nilai agama. Dalam

hal ini, masyarakat Indonesia mempunyai pandangan yang mirip dengan apa yang dikatakan Johansen (2007, 145) yang menyatakan bahwa munculnya kekerasan dipandang sebagai perlawanan kepada Tuhan.

Pada dasarnya menjalin hubungan persahabatan merupakan inti dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri ini, merupakan cerminan dari sikap masyarakat Indonesia dalam berperilaku sehari-hari. Merujuk pada pernyataan K. J. Holsti bahwa politik luar negeri merupakan *resultante* dari kondisi dalam negeri suatu negara, maka dapat dikatakan bahwa gaya politik luar negeri Indonesia juga merupakan cerminan dari sikap sehari-hari atau kondisi sosial dari masyarakat Indonesia. Masuknya Indonesia ke dalam kesatuan negara-negara Non Blok pada masa lalu, juga merupakan cerminan dari hal ini.

Dalam konteks demikian, Australia mempunyai posisi yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Australia yang memiliki keterkaitan erat dengan negara dan kebudayaan Barat, membuat posisinya menjadi penting karena dapat memegang peran dalam mendukung kebijakan Indonesia. Penempatan pasukan Amerika Serikat di Australia juga diharapkan tidak akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional Indonesia. Meski, pada dasarnya penempatan pasukan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kecurigaan dan ketegangan atau intensi konflik dengan Indonesia. Penempatan pasukan tersebut juga akan mendorong peningkatan anggaran dan personil militer di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Beberapa negara yang perekonomiannya sedang tumbuh pesat di Asia Tenggara seperti Thailand dan Singapura berpotensi untuk meningkatkan anggaran militernya, termasuk China dan Jepang di Asia Timur. Jika hal ini terjadi, maka potensi peningkatan anggaran militer tersebut juga akan dilakukan oleh India. Kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat Indonesia ikut terpengaruh.

Sebagai negara yang tergabung dalam Persemakmuran, Australia seharusnya dapat memperingatkan Malaysia yang sering melakukan pelanggaran terhadap Indonesia. Dengan demikian, hubungan baik dengan Australia dapat menjadi langkah diplomatik untuk membuat keseimbangan dengan negara-negara anggota persemakmuran lain, terutama yang berbatasan dengan Indonesia. Hubungan baik ini juga dapat menjadi nilai diplomatik penting di masa mendatang, seperti memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi apabila terjadi perselisihan dengan negara-negara tetangga.

Dengan demikian, pembebasan Corby tidak hanya memberikan keuntungan maksimal dengan pengeksradisian Adrian Kiki. Banyak

keuntungan yang dapat diambil dari hal tersebut, seperti 1) Upaya untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan Australia, 2) Perimbangan kekuatan diplomatik Indonesia dengan negara anggota persemakmuran Inggris lainnya, 3) Upaya diplomatik Indonesia dalam menghadapi Amerika Serikat yang menempatkan pasukannya di benua tersebut, 4) Menanggapi dinamika perkembangan politik di kawasan Pasifik Selatan, yang memiliki kemungkinan akan terus mengalami peningkatan.

Dinamika perkembangan politik di kawasan Pasifik Selatan dapat berpotensi mengalami persinggungan dengan kawasan Asia Tenggara. Persinggungan tersebut apabila mengarah pada hubungan yang negatif maka dapat berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Konflik dapat terjadi seiring berbagai kondisi, seperti kompetisi terhadap sumber-sumber ekonomi, faktor sejarah, hingga konflik yang dilakukan oleh lembaga (Jeong 2008, 44). Kondisi seperti ini telah terjadi di kawasan Asia Tenggara seperti yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, yang didominasi oleh faktor sejarah. Penempatan angkatan bersenjata Amerika Serikat dapat dimaknai secara berbeda, seperti sebagai upaya AS mengamankan jalur sumber-sumber ekonomi di kawasan. Pemerintah Indonesia juga harus dapat memahami dan menilai dengan jelas, konteks hubungan yang terjalin dengan negara-negara lain guna menghindari konflik di masa mendatang. Pembebasan Corby merupakan salah satu bentuk atau wujud dari upaya tersebut, khususnya pada Australia.

Simpulan

Dalam konteks teori pilihan rasional, pembebasan tahanan narkoba Schapelle Leigh Corby mempunyai keuntungan politis, baik bagi hubungan luar negeri maupun dalam negeri Indonesia. Dari sisi hubungan luar negeri, pembebasan tersebut memiliki keuntungan politis seperti, 1) Upaya untuk mempertahankan hubungan persahabatan dengan Australia, bagaimanapun kedekatan Australia dengan negara-negara Barat memberikan nilai penting tersendiri, 2) Perimbangan kekuatan diplomatik Indonesia dengan negara anggota Persemakmuran Inggris lainnya, 3) Upaya menghadapi dinamika perkembangan politik di kawasan Pasifik Selatan yang didominasi oleh pengaruh Australia, serta 4) Upaya diplomatik pemerintah Indonesia dalam mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat di masa depan. Sedangkan dalam konteks politik dalam negeri, keberhasilan pemerintah dalam melakukan ekstradisi tersebut memiliki nilai politis dan dapat menjadi langkah awal untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ekstradisi tahanan koruptor tersebut diharapkan juga dapat mendorong pengekstradisian tahanan lain yang berada di luar negeri. Secara sosiologis, keberhasilan dalam ekstradisi tahanan korupsi dapat

memberikan pengaruh positif bagi citra pemerintah Indonesia, yang berupaya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, di tengah perdebatan yang terjadi dalam masyarakat terkait keputusan tersebut, banyak keuntungan positif yang dapat diambil bagi Indonesia dan masyarakat di masa depan.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiardjo, Miriam, 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Jeong, Ho-Won, 2008. *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. Singapore: Sage.
- Marijan, Kacung, 2012. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Richmond, Oliver P, 2008. *Peace in International Realations*. London: Routledge.

Buku Terjemahan

- Gibbons, Michael T, 2002. *Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer: Tafsir Politik* (terj. Ali Noer Zaman, *Interpreting Politics*). Yogyakarta: Qalam.
- Holsti, K. J., 1987. *Politik Internasional: Kerangka Analisa* (terj. Efin Sudrajat et al., *International Politics, A Framework for Analysis*). Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Marsh, David, Gerry Stoker, 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (terj. Helmi Mahadi dan Shohifullah, *Theory and Method in Political Science*). Bandung: Nusa Media.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, 2007. *Teori Sosiologi Modern: Edisi Keenam* (terj. Alimandan, *Modern Sociological Theory 6th Edition*). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel dalam Buku

- Johansen, Jorgen, 2007. "Nonviolence: More than the Absence of Violence", dalam Webel, Charles, dan Johan Galtung (ed.), 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London: Routledge.
- Muchtar, Adinda Tenriangke, 2013. "Perempuan dalam Konflik," dalam Soetjipto, Ani, Pande Trimayuni (ed.), 2013. *Gender dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Jalasutra.

Artikel Online

- Nugroho, Bagus Prihantoro, 2014. "Menlu Soal Corby: Tak Ada Kaitan Bargain Dengan Adrian Kiki" [online]. dalam <http://news.detik.com/read/2014/02/06/150515/2489282/10/menlu-soal-corby-tak-ada-kaitan-bargain-dengan-adrian-kiki?nd771104bcj>. [diakses 28 Maret 2014].
- Rastika, Icha, 2014. "Istana Pembebasan Bersyarat Corby Jangan Dipolitisasi" [online]. dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/07/1930089/Istana.Pembebasan.Bersyarat.Corby.Jangan.Dipolitisasi>. [diakses 28 Maret 2014].
- Tumanggor, Budi Fernando, 2012. "AS Tempatkan Pasukan di Australia, China dan Indonesia Meradang" [online]. dalam <http://jaringnews.com/internasional/umum/12880/as-tempatkan-pasukan-di-australia-china-dan-indonesia-meradang>. [diakses 28 Maret 2014]